

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL USAHA
EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA
BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA
KUBE SINAR TANI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

RIMA NANDA YENI

07011181621014

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FEBRUARI 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL USAHA
EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA
BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DI
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

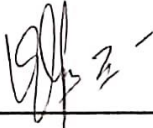
Oleh:

**RIMA NANDA YENI
07011181621014**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2020

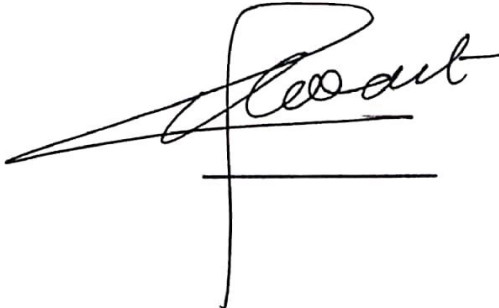
Pembimbing I

**Dr. Nengyanti, M. Hum
NIP. 196704121992032062**



Pembimbing II

**Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin di Kota Palembang"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Januari 2021.

Inderalaya, tanggal 11 Januari 2021

Ketua

1. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP.196704121992032002



Anggota

2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP.195706051985031003



3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004



4. Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002



Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin Pada KUBE Sinar Tani”. Proposal skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan derajat sarjana Administrasi Publik program Strasa Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan dalam penulisan skripsi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibunda Satriyeni dan Ayahanda Albazar selaku orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tak ternilai.
2. Kepada kakak tercinta Afdhalul fikri, Weni Zuryati, dan Arif Budiman uyang telah memberikan semangat yang luar bisa dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
3. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Banyak terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Nengyanti, M. Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk kedua sahabat yang selalu menyediakan waktu dan selalu membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu Dhurani Balqis, S.AP dan Hikmatul Fajri Mulya, S.Sos.
8. Terima kasih juga untuk keluarga cetigo yang selalu bersama dan selalu ada dalam setiap waktu Sukma Aisyah Putri, S.E., Ginez Dwi Rizanti, S.E., dan Kuntum Khoiroh Ummah, S.KM
9. Kepada temen-teman angkatan 2016 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya Indralaya.

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayahNya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dari penulisan skripsi ini, untuk itu apabila ada kekeliruan dalam penulisan, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Februari 2021

Rima Nanda Yeni

LEMBAR PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka jangan pernah mundur hadapilah apa yang ada dihadapan kita dan jalanilah apa yang telah menjadi takdir kita”

Atas ridho Allah SWT, Skripsi ini

saya persembahkan untuk:

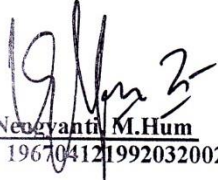
- Ayahku tercinta Albazar S.Pd dan Ibuku tercinta Satriyeni
- Kakak perempuanku tersayang Weni Zuryati
- Kedua kakak laki-laki Afdhalul Fikri dan Arif Budiman
- Sahabat dan teman-teman seperjuangan Fisip angkatan 2016
- A Imamater kebanggaan

ABSTRAK


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena yaitu kelompok KUBE yang bubar karena anggota tidak kompak dan usaha yang macet karena kurangnya pendamping sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin Pada KUBE Sinar Tani. Penelitian ini menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Marille S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang digunakan. Kemudian lingkungan kebijakan yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini belum terimplementasi karena dari segi dampak kebijakan belum memberikan tingkat kemandirian usaha bagi penerima bantuan sosial usaha pada KUBE Sinar Tani yang masih membutuhkan bimbingan dari pendamping sosial KUBE dan hanya memberikan dampak pendapatan. Hal ini disebabkan dari segi isi kebijakan yaitu belum memberikan kemandirian dan segi lingkungan kebijakan kurangnya strategi yaitu pelatihan untuk penerima manfaat. Adapun sarannya yaitu agar pelaksana kebijakan dapat memberikan pelatihan dan pendampingan yang cukup untuk menciptakan kemandirian usaha.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif KUBE, Fakir Miskin, Pendapatan, dan Kemandirian

Pembimbing I


Dr. Neogyanti M. Hum
NIP. 196704121992032002

Pembimbing II

Atas Nama Pembimbing
Alm. Drs. Joko Siswanto, M.Si
Ketua Jurusan AP

Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003

Indralaya, Februari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by several phenomena, namely the KUBE group that disbanded because the members were not cohesive and the business was stuck due to a lack of social companions. This study aims to determine the success of the Implementation of Productive Economic Social Business Assistance to Joint Business Groups for Handling the Poor at KUBE Sinar Tani. This study uses an implementation theory model proposed by Marille S. Grindle which states that the success of implementation is determined by the content of the policy which consists of influencing interests, types of benefits, degrees of change, location of decision making, program implementers and the resources used. Then the policy environment which consists of the power, interests and strategies of the actors involved, the characteristics of the institutions and regimes in power as well as the level of compliance and the response from the implementers. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The results of this study have not been implemented because in terms of the impact of the policy, it has not provided a level of business independence for the recipients of business social assistance at KUBE Sinar Tani who still need guidance from KUBE social assistants and only have an income impact. This is due to the content of the policy, which is not yet providing independence and in terms of the policy environment, a lack of strategy, namely training for beneficiaries. The suggestion is that policy implementers can provide sufficient training and assistance to create business independence.


Keywords: Productive Economic Business Social Assistance KUBE, Income, and Independence

Advisor I



Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Advisor II

Atas Nama Pembimbing
Alm. Drs. Joko Siswanto, M.Si
Koko Duman, A.P. 

Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031004

Indralaya, February 2021
Chairman of the Departement of Publik Administration
Faculty of Social and Politycal Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Kebijakan Publik	9
2. Implementasi Kebijakan	10
3. Model Implementasi	12
4. Model Implementasi yang Digunakan.....	15
5. Kebijakan Bantuan Sosial UEP kepada KUBE.....	17
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Definisi Konsep.....	26

C. Fokus Penelitian	28
D. Unit Analisis Data	30
E. Informan Penelitian	30
F. Jenis, Sumber Data dan Keabsahan Data	30
G. Teknik Pengumpulan Data	31
H. Teknik Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum	34
1. Provinsi Sumatera Selatan	34
2. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	37
3. Kebijakan bantuan usaha UEP kepada KUBE	45
B. Pembahasan dan Hasil.....	49
1. Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)	61
a. Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi.....	61
b. Tipe Manfaat.....	63
c. Derajat Perubahan yang Diinginkan.....	66
d. Letak Pengambilan Keputusan	68
e. Pelaksana Program.....	70
f. Sumber Daya yang Digunakan	73
2. Lingkungan Kebijakan (<i>Context of policy</i>).....	74
a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat	74
b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa.....	77
c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Penguasa	79
C. Matrik Temuan Hasil Penelitian.....	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Nama Kelompok KUBE.....	4
2. Tabel 2. Usaha KUBE Jualan Makanan.....	5
3. Tabel 3. Usaha KUBE Ternak.....	5
4. Tabel 4. Usaha KUBE Jasa	5
5. Tabel 5. Penelitian Terdahulu	21
6. Tabel 6. Fokus Penelitian	29
7. Tabel 7. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.....	36
8. Tabel 8. Hasil Analisis Kebijakan Implementasi Bantuan Usaha KUBE.....	85

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Kerangka Pemikiran	25
2. Gambar 2. Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.....	37
3. Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	40
4. Gambar 4. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan	57
5. Gambar 5. Penyaluran Bantuan Sosial Usaha KUBE	60
6. Gambar 6. Peralatan Catering.....	60
7. Gambar 7. Wawancara Pegawai Bidang Penanggulangan Kemiskinan	65
8. Gambar 8. Wawancara dengan Penerima Bantuan Sosial KUBE.....	67
9. Gambar9. Pemberian Bantuan Sosial Usaha KUBE	72
10. Gambar 10. Kegiatan Pertemuan Pendamping Sosial KUBE.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi	92
2. Surat Tugas Pembimbing Skripsi	93
3. Surat Izin Penelitian Dinas Sosial Kota Palembang.....	94
4. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95
5. Balasan Surat Izin Penelitian Dinas Sosial Kota Palembang	96
6. Surat Balasan Izin Penelitian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	97
7. Kartu Bimbingan Skripsi.....	98
8. Lembar Revisi Sidang Komprehensif	100
9. Pedoman Wawancara	104
10. Transkrip Observasi	106
11. Dokumentasi Wawancara.....	111
12. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.....	113

DAFTAR SINGKATAN

UEP	= Usaha Ekonomi Produktif
KUBE	= Kelompok Usaha Bersama
TKSK	= Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
PERMENSOS	= Peraturan Menteri Sosial
BAPPEDA	= Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah
BPS	= Badan Pusat Statistik
BDT	= Basis Data Terpadu
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KPPN	= Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara
SDM	= Sumber Daya Manusia
KPM	= Keluarga Penerima Manfaat

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, kemiskinan juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Di Indonesia kemiskinan merupakan permasalahan yang tak kunjung dapat teratasi walaupun berbagai kebijakan program telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan ini, salah satu penyebabnya disebabkan oleh kebijakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Ritonga (2003:1), kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan minimal merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan rumah dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Bantuan sosial merupakan semua pengeluaran negara yang berbentuk uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/ lembaga dan/ pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kemungkinan terjadinya resiko sosial. Program bantuan sosial adalah salah satu bagian Program Jaminan Sosial dan merupakan tanggung jawab dari pemerintah-pemerintah daerah yang peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar.

Berdasarkan RPJMD BAPPEDA Sumsel tahun 2013-2018 jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 di Provinsi Sumatera Selatan adalah 1.110.530 jiwa dengan persentase

sebesar 14,06 persen. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 1.100.830 jiwa dengan persentase yang ikut menurun sebesar 13,62 persen. Pada tahun 2015 penduduk miskin meningkat menjadi 1.145.630 jiwa dengan persentase 14,25 persen. Namun di tahun 2016 2017, dan 2018 penduduk miskin terus menurun menjadi 1.068.270 jiwa dengan persentase sebesar 12,80 persen.

Kementerian Sosial yang bergerak di bidang pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memperdayakan kelompok masyarakat miskin seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan kebijakan bantuan UEP kepada KUBE. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi kemiskinan yaitu melaksanakan kebijakan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada Kelompok Usaha Bersama. Adanya kebijakan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk penanganan fakir miskin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwasanya untuk melaksanakan peningkatan kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha perlu diberikan bantuan sosial permodalan melalui kelompok usaha bersama. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang pada mulanya kebijakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2015, namun peraturan tersebut dicabut karena dan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin, kemudian Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 664/KPTS/DINSOS/2017 tentang Penerima Bantuan

Sosial Berupa Peralatan Usaha Bagi Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Produktif di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

Berdasarkan isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019:

“Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 1:

“Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Kelompok Usaha Bersama ini tinggal dalam wilayah tertentu dengan tujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan hubungan sosial, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan permasalahan sosial yang dialami, dan menjadi wadah atau tempat untuk dapat mengembangkan usaha bersama. KUBE ini terbentuk didasari karena kesepakatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan setiap anggota, sumber daya alam yang tersedia, keadaan geografis, latar belakang kehidupan budaya yang sama, serta mempunyai motivasi dan tujuan yang sama”.

Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 664/KPTS/DINSOS/2017 pemberian bantuan kepada KUBE yang telah memenuhi syarat dan layak diberikan bantuan adalah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Berdasarkan BPS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tertinggi adalah kota Palembang. Berdasarkan BPS Kota Palembang tahun 2017 jumlah penduduk miskin Kota Palembang pada tahun 2017 adalah 184.410 jiwa. <https://palembangkota.bps.go.id/indicator/23/168/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan	Jumah Penduduk Miskin di Sumsel (Ribu Jiwa) tahun 2017
1.	Palembang	184,41
2.	Ogan Komering Ilir	127,06
3.	Musi Banyuasin	105,08
4.	Banyuasin	95,28
5.	Muara Enim	81,30
6.	Ogan Komering Ulu Timur	72,81
7.	Lahat	67,33
8.	Ogan Ilir	56,85
9.	Musi Rawas	55,96
10.	Ogan Komering Ulu	46,34
11.	Ogan Komering Ulu Selatan	38,63
12.	Musi Rawas Utara	36,46
13.	Empat Lawang	30,29
14.	Lubuk Linggau	29,54
15.	PALI	26,75
16.	Prabumulih	20,72
17.	Pagar Alam	12,12
Sumatera Selatan		1.086,92

Sumber : Data dari website Badan Pusat Statistik

Kota Palembang adalah salah satu kota dari 5 kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan sosial usaha KUBE. Pemilihan kabupaten/kota dalam pelaksanaan bantuan usaha KUBE ini berdasarkan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Kota Palembang merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Selatan yang tentunya merupakan pusat perekonomian sehingga kebijakan bantuan usaha ini sangat bermanfaat jika dilaksanakan di Kota Palembang.

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2017 di Kota Palembang ini berasal dari APBD yaitu bantuan berupa barang dan peralatan yang dibutuhkan untuk usaha yang akan dijalankan oleh penerima bantuan. Bantuan KUBE terdiri dari 20 kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang.

Tabel 2. Usaha KUBE Jualan Makanan

N O	NAMA KUBE	USAHA KUBE	KECAMATAN
1	Mie Qta	Jual Mie Ayam	Kalidoni
3	Anggrek	Catering	Iilir Timur 1
4	Kembang Tanjung	Catering	Iilir Timur 1
5	Harapan Bangsa	Jualan Gorengan	Kertapati
6	Harapan Bunda	Warung Manisan	Kertapati
7	Maju Jaya	Kue Keliling	Kertapati
8	Sampurna	Warung Kecil	Kertapati

Sumber: Paparan KUBE Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 3. Usaha KUBE Ternak

N O	NAMA KUBE	USAHA KUBE	KECAMATAN
1	Wak Jenggot		Iilir Barat II
2	Inara	Ternak Ikan Patin	Gandus
3	Teratai	Ternak Itik Petelur	Gandus
4	Suka Jaya	Ternak Itik Petelur	Kemuning
5	Musi Sejahtera	Ternak Burung Puyuh	Iilir Barat II

Sumber: Paparan KUBE Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 4. Usaha KUBE Jasa

N O	NAMA KUBE	USAHA KUBE	KECAMATAN
1	Pandu Bersama	Pertukangan Kayu	Iilir Barat I
2	Kedukan Cell	Jasa Isi Ulang Pulsa	Iilir Barat II
3	Perdana Cell	Jasa Isi Ulang Pulsa	Kemuning
4	Kembang Kamboja	Sewa Alat-Alat Memasak	Iilir Timur 1
5	Nago Besaung	Tenun Songket, Khas Palembang	Kertapati
6	Karya Bersama	Usaha Konveksi	Kertapati
7	Sinar Tani	Sewa Alat Catering	Kertapati

Sumber: Paparan KUBE Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Bantuan sosial UEP kepada KUBE ini terdiri dari 20 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Salah satu kecamatan yang mendapatkan bantuan sosial usaha KUBE di Kota Palembang adalah Kecamatan Kertapati. Kecamatan Kertapati merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah yang luas di Kota Palembang. Salah satu usaha yang dijalankan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kertapati ini yaitu usaha jasa penyewaan alat-alat masak dan catering tepatnya di Kelurahan Ogan Baru. Usaha KUBE penyewaan alat masak dan catering ini merupakan salah satu usaha KUBE yang masih berjalan sampai sekarang serta usaha jasa penyewaan alat masak dan catering ini merupakan usaha yang dapat bertahan lama dan peralatannya dapat digunakan dalam jangka panjang dan pemilihan usaha dirasa tepat dengan kondisi tempat tinggal yang ramai penduduk, sehingga peneliti tertarik meneliti penerima bantuan di Kelurahan Ogan Baru ini.

Implementasi kebijakan ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 20 kelompok. Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial UEP kepada KUBE Kota Palembang pada Tahun 2017 menggunakan anggaran sekitar 20 juta rupiah per kelompok.

Berkaitan dengan jumlah penerima telah sesuai dengan target yang ditentukan, namun dalam pelaksanaan kebijakan ini yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan pelaksana kebijakan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang kebijakan bantuan usaha KUBE ini serta pendataan calon penerima manfaat yang dilakukan dengan data lama sehingga banyak masyarakat yang seharusnya layak diberi bantuan namun tidak mendapatkan bantuan yang menyebabkan penyaluran bantuan kurang tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian Yuni Catur Wulan dkk Jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Malang dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUBE di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur belum optimal karena banyaknya usaha yang macet dikarenakan pendampingan yang kurang, kemampuan dan keterampilan anggota yang masih terbatas serta kurangnya keterampilan yang diberikan. Berdasarkan penelitian Marselinus Bin Hendrikus Program Pasca sarjana Universitas Terbuka dengan judul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam implementasi KUBE di Kecamatan Nunukan mengalami hambatan yaitu banyaknya KUBE yang tidak berjalan atau bahkan bubar yang disebabkan karena anggotanya berpindah dan rendahnya pemahaman dan kemampuan anggota serta jumlah pendamping yang sangat terbatas sedangkan kelompok yang harus didampingi cukup banyak.

Dengan permasalahan yang ditemukan peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan bantuan usaha KUBE belum berjalan dengan optimal sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bantuan KUBE di Kota Palembang dengan judul penelitian yaitu "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin Pada KUBE Sinar Kube".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin Pada KUBE Sinar Tani?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses implementasi kebijakan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin Pada KUBE Sinar Tani.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik tentang implementasi kebijakan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin Pada KUBE Sinar Tani.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai acuan pemerintah untuk instansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan selanjutnya mengenai kebijakan Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin Pada KUBE Sinar Tani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan*. Bandung: Alfabeta
- Creswell, John W. 2015. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; PT Alex Media Komputindo
- Mardalis. 1989. *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Subarsono, AG. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatas, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Thoah, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globlisasi*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service

Peraturan-peraturan:

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Ekonomi Produktif KKepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.
- Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 664/KPTS/DINSOS/2017 tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Peralatan Usaha Bagi Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Produktif di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Jurnal/Skripsi:

Yuni Catur Wulan, Nurul Umi Ati, Roni Pindahanto Widodo. 2019. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur). (Online) Vol. 13, No, 4, (<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3596/3233>, diakses pada 3 November 2020).

Hendrikus. MB. 2016. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara. (Online) <http://repository.ut.ac.id/6890/>, diakses pada 3 November 2020).

Aziz. M, IA. 2019. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Jurusan Ilmu Administrasi Negara UNSRI <https://repository.unsri.ac.id/16702/>, diakses pada 27 September 2020).

Internet:

BPS Kota Palembang, Angka Kemiskinan Kota Palembang. <https://palembangkota.bps.go.id/>. Diakses pada 28 Juni 2020 pukul 11.45 WIB

BPS Kota Palembang, Jumlah Penduduk Miskin. <https://palembangkota.bps.go.id/indicator/23/168/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.

BPS Provinsi Sumatera Selatan, Jumlah Penduduk Miskin Perkecamatan Tahun 2017. <https://sumsel.bps.go.id/>. Diakses pada 28 Juni 2020 pukul 13. 12 WIB

<http://www.neraca.co.id/article/115789/pemkot-palembang-tekan-angka-kemiskinan-menjadi-satu-digit>. Diakses Pada 12 Juli 2020 pukul 1320 WIB

Kementerian Sosial, Permensos No.2 Tahun 2019 Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE Untuk Penanganan Fakir Miskin. <https://www.kemosos.go.id/>. Diakses pada 23 Februari 2020 pukul 14.22 WIB